

SIKAP POLITIK SANTRI PONDOK PESANTREN PADA PERKEMBANGAN ISU POLARISASI POLITIK DI KABUPATEN CIAMIS

Yudi Rusfiana¹
Agus Nurulsyam²
Nindya Adhistry³

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang Jawa Barat

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat

³ Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Langlangbuana, Bandung Jawa Barat

Alamat email Koresponden: yudirusfiana@ipdn.ac.id

ABSTRACT

The issue of political polarization in Indonesia is not new. Differences in views between groups always arise when facing political events at both the national and local levels. Ciamis Regency, located east of West Java, directly borders Central Java Province. Its strategic geographic location and relatively high population growth make the existence of Islamic boarding schools (pesantren) an alternative for the community to meet their educational needs. The method and approach used were descriptive qualitative, with informants consisting of several students from Islamic boarding schools in Ciamis Regency and several alumni figures encountered incidentally. The results of this study indicate that the political attitudes of Islamic boarding school students, particularly those at Islamic boarding schools in Ciamis Regency, toward polarization, particularly in national and local political developments such as the presidential and regional elections, tend to be flat, meaning they follow developments, even if affiliation with a group is relatively homogeneous. Therefore, understanding the development of political dynamics among Islamic boarding school students is still needed to increase their political participation.

Keywords: *Political Polarization, Political Attitudes, Islamic Boarding School Students*

PENDAHULUAN

Polarisasi politik di Indonesia merupakan fenomena yang bersifat siklikal dan telah menjadi bagian dari dinamika demokrasi sejak era reformasi. Perbedaan pandangan antar golongan dalam merespons isu-isu politik bukan hanya lazim, tetapi juga menjadi indikator bahwa masyarakat Indonesia memiliki keragaman aspirasi dan identitas politik yang kompleks. Namun, dalam praktiknya, perbedaan ini sering kali berkembang menjadi ketegangan yang tajam, terutama ketika kontestasi politik memasuki fase-fase krusial seperti pemilihan umum.

Isu polarisasi politik di Indonesia merupakan fenomena yang terus berulang dan bukan hal yang baru di mana perbedaan pandangan antar golongan selalu muncul dalam menghadapi peristiwa politik, baik di level nasional maupun local. Kontestasi politik modern seringkali diwarnai ketegangan yang parah, bahkan lebih intens terjadi di media sosial dibandingkan hubungan langsung, sebagaimana tercermin dalam survei pada Pilpres 2019 yang menunjukkan konflik di media sosial mencapai 71,8%¹. Fakta menunjukkan bahwa polarisasi dan bahkan permusuhan masih terjadi di kalangan pendukung pasca-pemilihan². Fenomena serupa juga tampak dalam Pemilu 2024, di mana polarisasi politik sangat terasa di lingkungan pondok pesantren. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, lembaga pendidikan Islam tradisional seperti Pondok Pesantren memegang peran yang sangat sentral dan signifikan dalam dinamika politik³.

¹ Huda, M., & Dayat, M. (2019). Politisasi Ulama Pada Pilpres 2019 Perspektif Kyai Silo Di Kabupaten Pasuruan. *Kabillah: Journal of Social Community*, 4(1), 48-56.

² *Ibid*

³ Zahro, F., & Saputri, F. I. (2024). Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024. *Manabia: Jo Pradipta, F. T. D., Azaki, R., & Zulkarnain, T. (2025). Peran Pesantren dalam Pembentukan Kesadaran Politik Islam di Indonesia. Politik Islam*, 4(1), 90-110. *urnal of Constitutional Law*, 4(01), 21-36.

Kabupaten Ciamis, sebagai salah satu wilayah di sebelah timur Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, memiliki posisi geografis strategis dan perkembangan jumlah penduduk yang relatif tinggi, menjadikan keberadaan pondok pesantren sebagai alternatif penting untuk kebutuhan pendidikan masyarakat. Pesantren berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai agen sosialisasi politik yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kepemimpinan. Figur Kiai di pesantren merupakan tokoh karismatik yang dihormati dan menjadi panutan bagi komunitas. Hubungan emosional dan spiritual yang kuat antara santri dan Kiai membentuk pola kepatuhan yang tinggi, termasuk dalam hal orientasi politik. Akibatnya, apapun yang dikatakan oleh ulama diyakini akan memengaruhi santri dan jemaah. Fenomena ini membuat pondok pesantren menjadi target utama dan basis ajang pertarungan politik bagi berbagai elemen partai politik dan kandidat, yang berbondong-bondong datang untuk mencari dukungan penuh dari ulama, Kiai, dan santri, suatu praktik yang dikenal sebagai 'sowan'. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa nilai politik Kiai masih sangat tinggi di mata para politisi untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan massa.

Fenomena sikap politik suatu kaum atau golongan terhadap peristiwa politik yang terjadi tentunya akan menjadi pembeda dalam bersikap dan berperilaku. Kenyataan ini terjadi pada para santri pondok pesantren di Kabupaten Ciamis, di mana sikap politik mereka kebanyakan terutarakan dalam diskusi dan aktivitas yang berafiliasi dengan beberapa kelompok. Sikap politik didefinisikan sebagai kesiapan bertindak seseorang dalam merespons masalah politik (Khoirudin, 2010). Dalam konteks pesantren, orientasi politik santri dipengaruhi oleh orientasi kognitif (pengetahuan), afektif (ikatan emosional), dan evaluatif (penilaian moral dan etika politik).

Meskipun pesantren berperan penting dalam proses politik, polarisasi politik yang terjadi dapat membawa dampak negatif berupa fragmentasi internal di kalangan santri dan staf, mengganggu keharmonisan dan fokus pendidikan. Selain itu, polarisasi juga berisiko menimbulkan eksploitasi politik dan penurunan kualitas demokrasi, karena santri mungkin menerima informasi yang bias dan terbatas dari Kiai yang memiliki afiliasi tertentu. Oleh karena itu, penelitian mengenai sikap politik santri di Kabupaten Ciamis sangat mendesak untuk memahami bagaimana dinamika internal pesantren menghadapi isu polarisasi politik, dan bagaimana pesantren dapat terus memperkuat pemahaman politik Islam yang bersifat terbuka, moderat, dan inklusif, serta menjaga keutuhan dinamika politik dengan mengedepankan prinsip toleransi.

Berangkat dari latar belakang penelitian tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimana sikap politik santri Pondok Pesantren di Kabupaten Ciamis termanifestasi dalam merespons isu polarisasi politik, dan kelompok afiliasi apa saja yang dominan memengaruhi sikap dan perilaku politik mereka? (2) Sejauh mana pengaruh figur Kiai sebagai tokoh karismatik, panutan, dan sentral kepemimpinan di Pondok Pesantren memengaruhi pembentukan orientasi politik santri (meliputi orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif) dalam menghadapi polarisasi politik?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena sikap politik santri dalam merespons isu polarisasi politik di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Ciamis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna subjektif, konstruksi sosial, serta relasi kultural yang berkembang dalam kehidupan pesantren, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell (2016) yang menyatakan bahwa

penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada beberapa pondok pesantren yang memiliki karakteristik representatif, seperti Pondok Pesantren Darussalam, Miftahul Huda, Al-Hidayah, dan Al-Muhtadin. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2017) bahwa teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari sumber yang dianggap paling mengetahui fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi santri aktif, pengurus organisasi santri, serta alumni yang memiliki keterlibatan sosial dan politik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan data melalui triangulasi, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2018) bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Miles et al. (2014) menegaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara siklus dan interaktif hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pendekatan metodologis ini memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang komprehensif dan kontekstual, khususnya dalam menjelaskan keterkaitan antara polarisasi politik, peran Kiai sebagai agen sosialisasi politik, dan pembentukan sikap politik santri di lingkungan pesantren.

Kerangka Teori

Kerangka konseptual merupakan peta jalan penelitian yang mengaitkan variabel-variabel kunci dengan teori dan konsep yang relevan dari sumber-sumber yang tersedia. Berdasarkan judul penelitian "Sikap Politik Santri Pondok Pesantren pada Perkembangan Isu Polarisasi Politik di Kabupaten Ciamis" dan didukung oleh data pendukung lainnya, kerangka konseptual ini akan berfokus pada peran sentral institusi Pesantren dan figur Kiai sebagai mediator utama dalam membentuk sikap santri terhadap isu polarisasi.

Tabel 1. Variabel dan Konsep Kunci

KONSEP KUNCI	DEFINISI KONSEPTUAL	REFERENSI
Polarisasi Politik	Perbedaan pandangan antar golongan yang tajam dan seringkali menyebabkan konflik antar pendukung, terutama yang diekspresikan di media sosial. Fenomena ini menjadi ajang pertarungan politik dan klaim ulama sebagai magnet politik.	Huda, M., & Dayat, M. (2019). Politisasi Ulama Pada Pilpres 2019 Perspektif Kyai Silo Di Kabupaten Pasuruan. <i>Kabillah: Journal of Social Community</i> , 4(1), 48-56.
Pondok Pesantren & Santri	Pesantren adalah institusi pendidikan Islam tradisional yang berfungsi sebagai agen sosialisasi politik dan basis massa yang besar, khususnya di Jawa. Santri adalah kelompok yang sikap politiknya sangat dipengaruhi oleh tokoh yang diyakini.	Pradipta, F. T. D., Azaki, R., & Zulkarnain, T. (2025). Peran Pesantren dalam Pembentukan Kesadaran Politik Islam di Indonesia. <i>Politik Islam</i> , 4(1), 90- 110.
Sikap Politik Santri	Kesiapan bertindak individu dalam merespons masalah politik [Abstract Query]. Sikap ini terwujud dalam orientasi politik yang terbagi menjadi tiga aspek utama.	Zahro, F., & Saputri, F. I. (2024). Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024. <i>Manabia: Journal of Constitutional Law</i> , 4(01), 21-36.
Figur Kiai/Ulama	Tokoh karismatik dan panutan yang dihormati di pesantren,	Huda, M., & Dayat, M. (2019). Politisasi Ulama

	sering disebut sebagai "Raja-raja kecil" dengan kekuasaan penuh atas masyarakat yang memberinya mandat. Nilai politik Kiai masih sangat tinggi di mata politisi untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan massa.	Pada Pilpres 2019 Perspektif Kyai Silo Di Kabupaten Pasuruan. Kabillah: <i>Journal of Social Community</i> , 4(1), 48-56.
Sosialisasi Politik	Proses yang bertujuan meningkatkan pemahaman individu mengenai politik, hak dan kewajiban warga negara, serta cara berpartisipasi. Pesantren berperan krusial dalam proses ini, yang dipengaruhi oleh agen sosial seperti lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan.	Zahro, F., & Saputri, F. I. (2024). Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024. Manabia: <i>Journal of Constitutional Law</i> , 4(01), 21-36.

Sumber : Diolah Peneliti dari berbagai Sumber, 2025

Guna mendukung dalam pemecahan masalah, penelitian ini menggunakan kerangka teori Sosialisasi Politik dan Konsep Kepemimpinan Karismatik/Patron-Klien untuk menjelaskan bagaimana isu eksternal (Polarisasi Politik) dipahami dan direspons melalui filter internal pesantren (Kiai dan tradisi nderek).

1. Keterkaitan Polarisasi dan Sikap Santri (Faktor Eksternal)

Isu polarisasi politik yang terjadi di level nasional (misalnya dalam Pilpres) seringkali disebabkan oleh penggunaan Politik Agama untuk memenangkan pilihan atau penggunaan narasi untuk mengklasifikasi santri, seperti kategorisasi santri tradisional, modernis, neo-revivalis, radikal, dan liberal. Kontestasi ini, yang ditandai dengan upaya partai politik dan kandidat untuk mendapatkan dukungan Kyai (sowan), menciptakan lingkungan di mana santri harus menentukan sikap.

2. Peran Mediasi Pesantren dan Otoritas Kiai (Mekanisme Internal)

Sikap politik santri tidak terbentuk di ruang hampa, melainkan dimediasi oleh peran pesantren dan Kyai sebagai Agen Sosialisasi Politik.

- 1) Kepemimpinan Kharismatik dan Kepatuhan (*NdereK Kiai*): Kiai adalah sosok sentral yang dihormati dan memiliki kekuatan dalam mengatur kebijakan. Hubungan emosional dan spiritual antara santri dan Kiai membentuk pola kepatuhan yang tinggi terhadap orientasi politik (sistem *patron-klien*). Tradisi *tawadlu'* (menghormati) Kiai sangat kental, membuat santri patuh pada petunjuk Kiai bahkan terhadap hak berdemokrasi mereka. Kiai sangat menentukan arah politik santri.
- 2) Pendidikan Politik Informal Pesantren: Meskipun tidak memiliki kurikulum politik resmi, pesantren secara berkelanjutan membentuk kesadaran politik santri melalui aktivitas kultural dan religius. Aktivitas ini meliputi:
 - a. Forum *musyawarah kitab kuning* dan kajian *Bahts Al-Masail* (melatih analisis isu kebangsaan dan politik nasional dari perspektif *fiqh* klasik).
 - b. Forum *khitabiyah* (orasi ilmiah) dan tradisi budaya demokrasi internal (melatih keterampilan berpikir kritis dan partisipatif).

3. Manifestasi Sikap Politik Santri (Output)

Sikap politik santri pada perkembangan isu polarisasi dapat diukur melalui tiga orientasi politik yang saling berinteraksi, diantaranya :

- 1) Orientasi Kognitif yang meliputi pemahaman atau pengetahuan santri tentang isu polarisasi dan kewajiban politik (misalnya pengetahuan tentang Pemilu).
- 2) Orientasi Afektif sebagai ungkapan emosional atau perasaan (dukungan/penolakan) terhadap isu polarisasi atau figur calon yang didukung/ditolak oleh Kiai.
- 3) Orientasi Evaluatif atau keputusan dan penilaian moral santri terhadap objek politik, yang didasarkan pada standar nilai, etika, dan norma agama. Dalam konteks pesantren, politik dipandang sebagai upaya mengatur persoalan dunia sekaligus ibadah.

4. Konsekuensi Polarisasi

Polarisasi yang terjadi di lingkungan pesantren, yang menjadi basis ajang pertarungan politik, membawa dampak negatif yang signifikan, termasuk:

- 1) Fragmentasi Internal atau polarisasi yang menyebabkan perpecahan di kalangan santri dan staf, mengganggu keharmonisan dan fokus pendidikan.
- 2) Eksploitasi Politik. Sikap Politikus memanfaatkan pesantren untuk meraih dukungan, mengaburkan fungsi utama pesantren sebagai lembaga pendidikan dan moral.
- 3) Penurunan Kualitas Demokrasi. Santri dan masyarakat menerima informasi yang bias dan terbatas dari Kiai yang berpihak, sehingga memengaruhi keputusan pemilih secara negatif.

Berdasarkan keempat pendekatan tersebut, evaluasi reformasi birokrasi dalam penelitian ini menggunakan sintesis kerangka teoretis sebagai berikut:

Tabel 2 Hubungan Antar Variabel

Variabel Eksogen (Fokus Penelitian)	Variabel Intervening (Mekanisme Mediasi)	Variabel Endogen (Sikap Santri)
Isu Polarisasi Politik (di Kab. Ciamis/Nasional)	Peran Sentral Kiai/Ulama (Patron-Klien)	Sikap Politik Santri (Kesiapan Bertindak) [Huda, M., & Dayat, M. (2019). Politisasi Ulama Pada Pilpres 2019 Perspektif Kyai Silo Di Kabupaten Pasuruan. <i>Kabillah: Journal of Social Community</i> , 4(1), 48-56.]
Isu SARA/Politik Agama Pemanfaatan Basis Massa Pesantren	Sosialisasi & Pendidikan Politik Pesantren (Melalui Musyawarah, Bahts Al-Masail, dsb.)	Orientasi Politik Santri: 1. Kognitif (Pengetahuan) 2. Afektif (Ikatan Emosional) 3. Evaluatif (Penilaian Moral/Etika)
	Dampak Polarisasi	Fragmentasi Internal, Eksploitasi Politik, Penurunan Kualitas Demokrasi

Sumber : Diolah Peneliti dari berbagai Sumber, 2025

PEMBAHASAN

- Sikap politik santri Pondok Pesantren di Kabupaten Ciamis termanifestasi dalam merespons isu polarisasi politik, dan kelompok afiliasi apa saja yang dominan memengaruhi sikap dan perilaku politik mereka.**

Sikap politik santri pondok pesantren di Kabupaten Ciamis termanifestasi dalam berbagai bentuk aktivitas yang menunjukkan keterlibatan mereka terhadap isu-isu politik, terutama dalam konteks polarisasi yang berkembang di tingkat nasional maupun lokal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa santri dari Pondok Pesantren Darussalam, Miftahul Huda, dan Al- Hidayah, diketahui bahwa bentuk respons santri terhadap polarisasi politik

lebih banyak terwujud melalui diskusi internal, forum kajian kitab kuning, dan partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan yang memiliki nuansa politik. Salah satu santri menyatakan: “Kami sering membahas isu-isu politik dalam forum Bahtsul Masail, terutama menjelang pemilu. Biasanya, arahan Kiai menjadi penentu arah diskusi kami.” (Wawancara, Santri PP Miftahul Huda, 2025).

Sikap politik santri cenderung mengikuti arus dominan yang berkembang di lingkungan pesantren, yang sangat dipengaruhi oleh arahan dan preferensi politik Kiai. Hal ini sejalan dengan temuan Zahro & Saputri (2024) yang menyebutkan bahwa orientasi politik santri sangat dipengaruhi oleh figur Kiai sebagai patron utama dalam sistem sosial pesantren. dalam hal afiliasi, santri di Kabupaten Ciamis menunjukkan keterkaitan dengan berbagai jaringan keagamaan dan sosial. Afiliasi yang paling dominan adalah dengan organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang masing-masing memiliki pengaruh ideologis dan jaringan struktural yang kuat. Selain itu, terdapat kelompok salafi dan neo-revivalis yang aktif menyuarakan pandangan politik melalui media sosial, serta kelompok santri milenial yang lebih terbuka terhadap isu-isu politik kontemporer.

Kelompok alumni pesantren juga memainkan peran penting dalam membentuk preferensi politik santri. Alumni yang telah menjadi tokoh masyarakat atau aktivis politik lokal sering kembali ke pesantren untuk memberikan ceramah atau mengadakan kegiatan sosial, yang secara tidak langsung membentuk narasi politik di kalangan santri. Pradipta et al. (2025) menegaskan bahwa pesantren merupakan basis massa yang besar dan menjadi ruang strategis bagi pembentukan kesadaran politik Islam di Indonesia.

Media sosial menjadi ruang ekspresi politik yang paling aktif bagi santri, terutama generasi muda yang lebih melek teknologi. Namun, ruang ini juga menjadi ladang subur bagi polarisasi dan disinformasi. Santri yang aktif di media digital cenderung lebih cepat terpapar isu politik dan membentuk sikap berdasarkan narasi yang berkembang di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Hasil wawancara dengan santri dari PP Al-Hidayah menunjukkan bahwa mereka sering mendapatkan informasi politik dari akun dakwah yang juga menyisipkan pesan-pesan politik: “Saya tahu tentang calon presiden dari akun dakwah di Instagram. Kadang mereka menyebut nama dan menyarankan pilihan, jadi saya ikut saja.” (Wawancara, Santri PP Al-Hidayah, 2025). Temuan ini memperkuat argumen Huda & Dayat (2019) bahwa ulama dan pesantren telah menjadi magnet politik dalam kontestasi elektoral, di mana klaim dukungan dari Kiai dianggap sebagai legitimasi politik yang kuat.

2. Pengaruh Figur Kiai terhadap Pembentukan Orientasi Politik Santri dalam Menghadapi Polarisasi Politik.

Dalam konteks pondok pesantren di Kabupaten Ciamis, figur Kiai memiliki peran yang sangat sentral dalam membentuk orientasi politik santri. Kiai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual dan pengajar agama, tetapi juga sebagai patron politik yang memiliki otoritas tinggi dalam menentukan arah pandangan dan sikap politik komunitas pesantren. Kepemimpinan karismatik yang dimiliki oleh Kiai menciptakan hubungan patron-klien yang kuat antara dirinya dan para santri. Hal ini tercermin dalam tradisi “nderek Kiai” atau mengikuti arahan Kiai secara total, termasuk dalam hal pilihan politik. Hasil wawancara dengan salah satu santri senior dari Pondok Pesantren Al-Muhtadin, Kecamatan Cijeungjing, mengungkapkan:

“Kami tidak pernah secara langsung diajarkan politik, tapi kalau Kiai sudah memberi isyarat atau menyebut nama tokoh, kami tahu ke mana arah pilihan kami. Itu bagian dari ta’dzim kami kepada beliau.” (Wawancara, Santri PP Al-Muhtadin, 2025)

Fenomena ini menunjukkan bahwa preferensi politik santri sering kali mencerminkan pilihan politik Kiai. Dalam sistem sosial pesantren, kepatuhan terhadap Kiai bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga emosional dan spiritual. Huda & Dayat (2019) menyebut Kiai sebagai “raja-raja kecil” yang memiliki kekuasaan penuh atas komunitasnya, termasuk dalam urusan politik.

Orientasi politik santri terbentuk melalui tiga dimensi utama: kognitif, afektif, dan evaluatif. Secara kognitif, santri memperoleh pemahaman tentang isu-isu politik melalui forum-forum diskusi seperti Bahtsul Masail, kajian kitab kuning, dan musyawarah yang membahas persoalan kebangsaan dari perspektif fiqh klasik. Dalam wawancara dengan pengurus organisasi santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda, disebutkan bahwa:

“Kami sering membahas isu-isu nasional dalam forum Bahtsul Masail. Misalnya, bagaimana hukum memilih pemimpin dalam Islam, atau bagaimana menyikapi kampanye politik. Itu semua dibahas dari kitab.” (Wawancara, Pengurus OSPP Miftahul Huda, 2025).

Secara afektif, ikatan emosional santri terhadap Kiai sangat kuat. Loyalitas ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga ideologis. Ketika Kiai menunjukkan dukungan terhadap tokoh atau partai tertentu, santri cenderung mengikuti dengan penuh kepercayaan. Ini memperkuat temuan Zahro & Saputri (2024) yang menyatakan bahwa afiliasi politik santri sangat dipengaruhi oleh relasi emosional

dengan figur Kiai. Sementara itu, orientasi evaluatif santri terhadap isu politik dibentuk oleh nilai-nilai moral dan etika pesantren.

Politik dipandang bukan semata-mata sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah. Dalam wawancara dengan alumni pesantren yang kini menjadi tokoh masyarakat di Kecamatan Panumbangan, ia menyatakan:

“Kami diajarkan bahwa politik itu bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. Jadi, memilih pemimpin itu bukan soal menang-kalah, tapi soal siapa yang paling maslahat untuk umat.” (Wawancara, Alumni PP Panumbangan, 2025).

Pendidikan politik di pesantren berlangsung secara informal. Meskipun tidak terdapat kurikulum politik formal, kesadaran politik santri dibentuk melalui berbagai aktivitas kultural dan religius. Tradisi orasi ilmiah (khitabiyah), diskusi kitab klasik yang mengaitkan fiqh dengan isu kontemporer, serta simulasi demokrasi internal seperti pemilihan ketua kamar atau pengurus organisasi santri menjadi sarana pembelajaran politik yang efektif. Pradipta et al. (2025) menegaskan bahwa pesantren merupakan agen sosialisasi politik yang membentuk kesadaran politik Islam yang khas yang berbasis nilai, etika, dan tradisi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh figur Kiai terhadap pembentukan orientasi politik santri sangat signifikan. Melalui kepemimpinan karismatik, pendidikan informal, dan relasi patron-klien yang kuat, Kiai menjadi aktor utama dalam membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku politik santri dalam menghadapi polarisasi politik yang berkembang di masyarakat

SIMPULAN

Sikap politik santri muncul secara aktif sebagai respons terhadap dinamika polarisasi politik yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun lokal. Sikap ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran nilai dan arahan yang berlangsung secara berkelanjutan di lingkungan pesantren. Forum-forum seperti Bahtsul Masail, kajian kitab kuning, serta kegiatan sosial keagamaan menjadi sarana utama bagi santri untuk memahami dan mendiskusikan isu-isu politik yang sedang berkembang. Dalam praktiknya, arah sikap politik santri sangat dipengaruhi oleh pandangan dan preferensi politik Kiai, yang memiliki posisi sentral sebagai pemimpin spiritual dan sosial di pesantren. afiliasi politik santri juga terbentuk melalui keterlibatan mereka dalam jaringan keagamaan dan sosial yang lebih luas, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta kelompok salafi dan neo-revivalis. Selain itu, komunitas santri milenial yang aktif di media sosial turut membentuk pola pikir politik yang lebih terbuka terhadap isu-isu kontemporer. Alumni pesantren yang telah menjadi tokoh masyarakat atau aktivis politik lokal juga berperan dalam membentuk narasi politik di kalangan santri, baik secara langsung melalui kegiatan ceramah maupun secara tidak langsung melalui pengaruh sosial mereka. Media sosial menjadi ruang yang paling dominan bagi santri muda dalam mengekspresikan pandangan politik mereka. Namun, platform ini juga menjadi saluran yang rawan terhadap penyebaran informasi yang bias dan memicu polarisasi. Santri yang aktif di media digital cenderung lebih cepat membentuk sikap politik berdasarkan narasi yang berkembang di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube.

Pengaruh Kiai dalam membentuk orientasi politik santri sangat kuat dan mencakup berbagai aspek kehidupan pesantren. Dalam sistem patron-klien yang khas, Kiai memiliki otoritas yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan politik. Orientasi politik santri terbentuk melalui tiga

dimensi utama: kognitif, yaitu pemahaman terhadap isu politik melalui kajian kitab dan diskusi; afektif, yaitu ikatan emosional terhadap Kiai dan tokoh yang didukungnya; serta evaluatif, yaitu penilaian terhadap isu politik berdasarkan nilai-nilai moral dan etika pesantren. Proses pendidikan politik ini berlangsung secara informal melalui kegiatan seperti orasi ilmiah (*khitabiyah*), diskusi fiqh kontemporer, dan praktik demokrasi internal seperti pemilihan pengurus organisasi santri.

Dengan demikian, pondok pesantren di Kabupaten Ciamis tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga memainkan peran penting sebagai agen sosialisasi politik. Melalui nilai-nilai tradisional, kepemimpinan karismatik, dan pendekatan kultural, pesantren membentuk kesadaran politik Islam yang khas di kalangan santri. Figur Kiai menjadi tokoh kunci dalam mengarahkan sikap politik santri, terutama dalam menghadapi tantangan polarisasi politik yang semakin kompleks di era digital saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameliaanam (2025). Peran Pesantren Dalam Pembentukan Kesadaran Politik Islam Di Indonesia. Politik Islam Vol.4 No.1.. (Menyediakan konteks peran pesantren sebagai agen sosialisasi politik dan pembentukan karakter politik moderat).
- Creswell, J. W. (2016). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Dr. H. Cecep Suryana, M.Si., Dini Nurmalasari, S.Ag., Mochamad Yazid Nur Imannullah, S.T., Ila Nurlaila Dachlan, S.Sos. (2024). Ustadz dan Politik Perspektif Ustadz Nashrudin Syarief. Gunung Djati Publishing.. (Menggali peran ulama/ustadz dalam politik, dampak negatif polarisasi, dan sikap tawadhu' santri terhadap Ustadz).
- Fatimatuz Zahro, Fenolia Intan Saputri (2024). Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024. Manabia: Journal of Constitutional Law, Vol. 04, No. 01, Jul 2024..

(Fokus utama pada polarisasi di pesantren, peran Kiai sentral, dan dampak negatifnya, serta orientasi politik santri).

Giofani Hutri Engzelli, Frans Tory Damara Pradipta, Raihan Azaki, Tharischa Zulkarnain,

Huda, M., & Dayat, M. (2019). Politisasi Ulama Pada Pilpres 2019 Perspektif Kyai Silo Di Kabupaten Pasuruan. *Kabillah: Journal of Social Community*, 4(1), 48–56.

Kuperju Syahputra Ritonga (2025). Politik dan Pesantren Studi Kasus Pesantren Darul Arafah Raya. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol.3, No.5 Oktober 2025..* (Menyajikan peran pesantren dalam politik lokal dan pendidikan demokrasi bagi santri).

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Mohamad Khoirul Fata (2018). Membaca Polarisasi Santri Dalam Kontestasi Pilpres 2019. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Volume 18*,

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Nomor 02, November 2018.. (Membahas polarisasi santri dalam kontestasi politik dan narasi Islam yang digunakan).

Pradipta, F. T. D., Azaki, R., & Zulkarnain, T. (2025). Peran Pesantren dalam Pembentukan Kesadaran Politik Islam di Indonesia. *Politik Islam*, 4(1), 90–110.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Zahro, F., & Saputri, F. I. (2024). Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(01), 21–36.